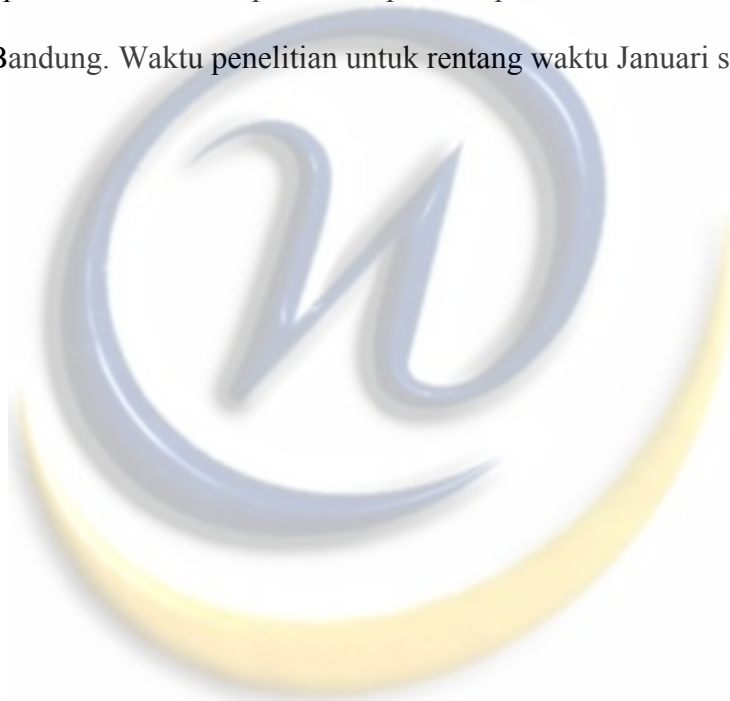


mendapatkan bahan yang akan dijadikan landasan teori dalam penyusunan skripsi.

### **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada 10 perusahaan BUMN Pusat yang berada di Bandung. Waktu penelitian untuk rentang waktu Januari sampai selesai.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Peranan**

Menurut **Komaruddin (1994;768)** ‘peranan- role’ memiliki beberapa definisi yaitu:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

## **2.2 Audit Internal**

### **2.2.1 Pengertian Audit**

**Arens dan Loebbecke (2000;7)** mengemukakan pengertian audit adalah:

“Auditing is accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent independent person.”

“Artinya bahwa auditing merupakan suatu proses penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti mengenai informasi untuk meneliti dan melaporkan tingkat hubungan antara informasi dengan criteria yang telah ditetapkan. Auditing ini harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten.”

### **2.2.2 Pengertian Audit Internal**

Menurut Standar Profesi Audit Internal (**SPAI 2004;5**) definisi audit internal adalah:

“ Kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui

suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance.”

Sedangkan pengertian audit internal menurut **Arens et al (2003;732)** seperti yang dikutip oleh **Hiro Tugiman (2004;3)** sebagai berikut:

“ Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization operations it helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes.”

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa audit internal adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi sebagai pedoman filsafat yang memberikan suatu nilai tambah dalam memperbaiki kegiatan operasi perusahaan. Audit internal membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki keefektifan pengendalian risiko manajemen serta pengaturan dan pengelolaan organisasi.

Boynton & Kell (1996;839) mengemukakan mengenai definisi audit internal yaitu:

“ An independent appraisals function established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization.”

Dari definisi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Independent, menandakan bahwa audit bersifat bebas dan perbatasan yang dapat mengurangi ruang lingkup dan keefektifan atas audit ataupun pelaporan atas temuan audit serta kesimpulan.

2. Appraisal, menyatakan keyakinan penilaian audit internal atas kesimpulan yang dibuatnya.
3. Established, menyatakan pengakuan perusahaan atas peranan audit internal.
4. Examine and evaluate, menyatakan tindakan audit internal sebagai auditor untuk menentukan fakta dan sebagai pengevaluasian dan menggunakan pertimbangannya.
5. Its activities, menyatakan bahwa ruang lingkup pekerjaan audit internal mencakup seluruh aktivitas organisasi.
6. To the organization, menegaskan ruang lingkup pelayanan audit internal ditujukan kepada seluruh bagian informasi.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa audit internal adalah aktivitas yang memberikan pelayanan kepada manajemen yang meliputi audit dan penilaian terhadap operasi pada seluruh tingkat organisasi perusahaan.

### **2.2.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal**

Tujuan audit internal sebenarnya sudah tersirat dalam definisi audit internal itu sendiri yaitu membantu seluruh anggota manajemen agar dapat melaksanakan tanggung jawab secara efektif, dengan jelas memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, saran dan keterangan dari operasi perusahaan yang diperiksanya.

Tujuan audit internal menurut **Boynton & Kell (1996;840)** adalah sebagai berikut:

“The objective of internal auditing is to assist members of an organization in the effective discharge of their responsibilities. In meeting this objective, internal auditing provides analyses, appraisals, recommendations, counsel, and information concerning the activities that have been audited. The objective of internal auditing includes promoting effective control throughout the organization at reasonable cost.”

Jadi tujuan audit internal dapat membantu manajemen melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, dengan mengadakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan saran terhadap kegiatan yang diperiksanya.

**Mulyadi (1992;104)** mengemukakan tujuan audit internal adalah sebagai berikut:

“Membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting mengenai kegiatan mereka.”

Dalam mencapai tujuan tersebut, perlu kiranya memperhatikan aktivitas-aktivitas audit internal. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh **Stettler (1980;82)** :

“As a convenient summary of these objectives, it might be stated that the internal auditor is primarily concerned with evaluation, compliance and Verification.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan tiga aktivitas utama auditor internal, yaitu:

## 1. Compliance

Audit internal merupakan suatu audit ketaatan yang berfungsi untuk menentukan dan mengawasi pelaksanaan aktivitas perusahaan dan seluruh karyawan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan selain itu audit ini juga digunakan untuk menentukan aktivitas-aktivitas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan prosedur dan pengawasan yang baikpun tidak akan ada guna apabila pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan baik.

## 2. Verification

Unsur audit internal lainnya adalah verifikasi. Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh audit internal lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan audit yang dilakukan oleh audit eksternal. Ini disebabkan audit internal lebih memahami seluk beluk aktivitas perusahaan dan mempunyai pengetahuan khusus mengenai perusahaan. Selain itu verifikasi yang dilakukan oleh auditor internal secara detail tidak praktis dan tidak ekonomis dan biasanya pimpinan perusahaan menghendaki dilakukan verifikasi secara kontinyu agar dapat dilakukan tindakan yang segera.

Verifikasi ini dilakukan oleh auditor internal terhadap dokumen-dokumen, catatan-catatan akuntansi dan laporan-laporan, baik yang menyangkut aktiva, kewajiban, modal ataupun hasil operasi perusahaan dengan tujuan untuk menentukan kebenaran informasi yang tercermin dalam laporan tersebut.

### 3. Evaluation

Setelah melakukan verifikasi, tahap selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam pengendalian internal yang ada. Dalam melaksanakan evaluasi, audit internal memerlukan penilaian yang lebih matang dan cermat untuk dapat menentukan keefektifan pengendalian internal yang diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan kebilakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan menerima laporan dari hasil compliance, operational, verification, dan evaluation. Jika terjadi penyimpangan terhadap apa yang telah ditetapkan, pimpinan diberitahu dan diberi penjelasan mengenai penyebab terjadinya, juga diberikan rekomendasi atas solusi-solusinya.

Dengan demikian jelas audit internal juga hanya bertanggung jawab sebatas penilaian yang dilakukannya, sedangkan tindakan koreksinya merupakan tugas dari manajemen.

Kriteria audit internal yang efektif adalah sebagai berikut:

1. Adanya struktur organisasi serta uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab bagian audit internal
2. Kedudukan audit internal dalam organisasi harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga auditor internal dapat menjalankan independensinya secara penuh dan benar-benar

3. Adanya program audit yang disusun dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan audit yang diharapkan
4. Tersedianya personalia bagian audit internal yang mempunyai bekal keahlian teknis dan ahli di bidangnya
5. Hasil audit dari sifat audit internal yang disertai saran tindakan koreksinya mendapatkan dukungan manajemen
6. Adanya laporan hasil pemeriksaan yang menunjukkan apa yang telah dicapai dan apa yang dapat dicapai serta saran mengenai perbaikan

Audit internal terasa semakin penting dan diperlukan dengan bertambah luasnya ruang lingkup perusahaan, serta semakin luas dan kompleksnya dunia usaha. Demikian pula manajemen perlu mendelegasikan wewenang pada bawahannya untuk menciptakan pengendalian yang baik mengenai pelaksanaan operasi secara langsung. Dengan demikian diperlukan suatu alat penghubung untuk menjembatannya yaitu, suatu pengujian yang cukup bebas dari organisasi ini. Di samping itu juga diperlukan penekanan-penekanan agar kegiatan usaha berjalan lancar.

Mengenai ruang lingkup audit internal, **Boynton & Kell (2001;983)** mengemukakan sebagai berikut:

“Scope of work – The scope of internal audit should encompass the examination & evaluation of the adequacy and effectiveness of the organization’s system of internal control and quality of performance in carrying out assigned responsibilities : 1) reliability and integrity of information; 2) compliance with policies, plans, procedures, laws, and regulations; 3) safe guarding of assets; 4)

economical and efficient use of resources; 5) accomplishment of established objectives and goals for operations programs.”

Dapat dijelaskan, bahwa ruang lingkup audit internal sebaiknya meliputi:

1. Memeriksa dan menilai keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara-cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
2. Pemeriksaan ketaatan terhadap kebijaksanaan, prosedur, rencana, hukum, dan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Memeriksa apakah semua aktiva telah dipertanggung jawabkan dengan benar dan dilindungi untuk menghindari kehilangan atau pemborosan.
4. Menilai keefektifan pemakaian berbagai sumber daya.
5. Memeriksa operasi atau program-program usaha, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

#### **2.2.4 Wewenang Tugas, dan Tanggung Jawab Audit Internal**

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, audit internal harus mengetahui wewenang tugas dan tanggung jawabnya secara jelas. Fungsi audit internal memerlukan pemeriksaan yang berkualitas tinggi. Fungsi audit internal tidak akan berhasil tanpa adanya orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup,

mempunyai daya imajinasi yang kuat, serta berinisiatif dan mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain.

Fungsi audit internal juga ditentukan oleh bantuan dan dorongan yang penuh dan nyata dari pimpinan tertinggi di perusahaan. Oleh karena itu, pimpinan harus menetapkan kebijakan mengenai tujuan, wewenang dan tanggung jawab auditor internal.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik, fungsi pemeriksaan internal dinyatakan sebagai berikut:

“Fungsi audit internal ditetapkan dalam satuan usaha untuk memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal lain. Penetapan suatu fungsi audit internal yang efektif mencakup pertimbangan wewenang dan hubungan pelaporannya, kualifikasi staf dan sumber dananya.”

**IAI (1994; 319.28)**

Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pemeriksaan internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penilaian terhadap prosedur dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu seperti penilaian efisiensi prosedur yang telah ditetapkan dan pengembangan serta penyempurnaan prosedur tersebut.

- b. Penilaian terhadap data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan membuat analisis lebih lanjut untuk mendukung kesimpulan tertentu.
- c. Penilaian kegiatan yang menyangkut ketaatan terhadap kebijakan, peraturan pemerintah dan kewajiban-kewajiban dengan pihak luar.

Wewenang audit internal menurut **Holmes and Burns (1979;150)** adalah sebagai berikut:

“The related authority should provide the internal auditor full access to all of the organization, record, properties, and personal relevant to the subject under review. The internal auditor should be free to review and appraise policies, plans, procedures and records”.

Berdasarkan pendapat tersebut, wewenang yang dimiliki auditor internal dalam melakukan audit yaitu bebas untuk mereview dan menilai kebijakan-kebijakan, rencana, prosedur dan sistem yang telah ditetapkan. Wewenang yang diberikan harus bersumber dari manajemen dan disetujui oleh dewan direksi.

Sebagian tugas dari audit internal adalah membantu manajemen dalam tujuan perusahaan, dengan cara melakukan audit dan penilaian secara objektif serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil auditnya. Karena tugas auditor internal adalah mengaudit dan meneliti seluruh kegiatan perusahaan, seorang auditor internal harus menguasai seluruh aspek dalam ruang lingkup perusahaan, baik yang

berhubungan dengan prosedur-prosedur akuntansi dan keuangan, produksi-produksi, pengembangan, penjualan dan pemasaran, teknik dan lain-lain.

Adapun tanggung jawab audit internal menurut komite Ikatan Akuntan Indonesia **IAI (1994;322.2)** dalam Standar Profesional Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

“Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan data analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada manajemen satuan usaha dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang di auditnya dan tanggung jawab penting fungsi audit internal adalah memantau kinerja pengendalian satuan usaha.

Tanggung jawab pemeriksaan internal meliputi pengkoordinasian kegiatan pemeriksaan internal dengan bagian lainnya untuk mencapai tujuan pemeriksaan internal dan juga perusahaan.

Di samping itu tanggung jawab pemeriksaan internal juga meneliti pengkoordinasian kegiatan pemeriksaan internal dengan bagian lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan yang dikemukakan oleh **Holmes and Burn (1979;150)** sebagai berikut:

The Internal Auditor's responsibilities should be:

1. To inform and advise management and to discharge this responsibility in a manner that is consistent with the code of ethics of The Institute of Internal Auditors.
2. To coordinate activities with others so as to best achieve audit objectives and the objectives of the organization.

Audit internal merupakan kegiatan penilaian dan pemeriksaan atas kelayakan dan efektifitas struktur pengendalian yang telah ditetapkan dan juga penilaian mutu pelaksanaan pekerjaan petugas yang terdapat dalam organisasi. Audit internal dilakukan dengan cara memeriksa kegiatan akuntansi, keuangan dan kegiatan lain sebagai jasa bagi manajemen.

Jika dapat disimpulkan bahwa auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada manajemen satuan usaha dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggungjawabnya tersebut, auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.

Atas dasar penjelasan mengenai wewenang, tugas dan tanggungjawab auditor internal, dapat diketahui bahwa audit internal merupakan fungsi staf yang lepas dari fungsi administrative atau pencatatan dan fungsi keuangan. Oleh karena itu, auditor internal tidak mempunyai wewenang untuk memberi perintah langsung (line authority) pada pegawai-pegawai bidang operasi.

### **2.2.5 Pentingnya Audit Internal**

Akibat dari semakin luasnya duniausaha, timbullah dampak negative yaitu semakin jauhnya hubungan antara pimpinan dengan pelaksana operasi secara

langsung. Dengan demikian diperlukan suatu alat penghubung untuk menjembatannya. Di sinilah pengaruh penting audit internal dalam membantu manajemen untuk meneliti dan mengawasi metode dan teknik yang menjadi alat pengendalian internal yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan oleh pelaku dalam organisasi tersebut.

**Heckert dan Wilson (1963,6730)** mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan auditor internal yaitu:

- 1.If the company relatively large, so that extensive use is being, or should be made accounting or statistical controls.
- 2.If operations take place at more than one location.
- 3.If the system of internal controls is not being, or can not be made fully affective.
- 4.If the auditor can perform function other wise performed by the public accountant with a resulting reduction in the audit fee.
- 5.If the owner of management desire or request such a tool as a mean of keeping informed about certain aspect of business.

Pernyataan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Jika perusahaan relative besar sehingga harus digunakan pengawasan statistik akuntansi yang luas dan relative.
2. Jika operasi-operasi terjadi pada lebih dari satu tempat.
3. Jika sistem pengendalian tidak terlaksana atau tidak efektif.
4. Jika auditor dapat melaksanakan fungsi-fungsinya selain yang dilaksanakan akuntan publik sehingga dapat mengurangi honor audit.

5. Jika pemilik atau manajemen membutuhkan alat rekomendasi itu sebagai alat untuk mendapatkan informasi mengenai aspek-aspek usaha tertentu.

Audit internal berhubungan dengan semua kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit terhadap catatan-catatan akuntansi. Ukuran yang dijadikan dasar penilaian adalah sebagai berikut:

1. Prosedur-prosedur yang ditetapkan
2. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan
3. Anggaran atau standar yang telah ditentukan
4. Peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku

Menurut **Mulyadi dan Kanaka (1998;202-203)** seorang auditor internal melakukan aktivitas sebagai berikut:

1. Audit dan penilaian terhadap baik atau tidaknya pengendalian akuntansi dan pengendalian administrative dan mendorong penggunaan cara-cara yang efektif dengan biaya yang minimal.
2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi.
3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian.

4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan.

5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan.

### **2.2.6 Independensi dan Objektivitas Audit Internal**

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, auditor internal tidak bertanggungjawab dalam fungsi eksekutif maupun operasi. Bagian ini harus mempunyai wewenang dalam mengkaji dan menilai setiap bagian dalam perusahaan sehingga dalam melaksanakan kegiatannya, audit internal dapat bertindak subyektif dan efisien mungkin. Oleh karena itu, sebaiknya auditor internal mempunyai wewenang langsung atas setiap bagian yang akan diaudit sehingga dapat mempertahankan independensinya dalam organisasi.

Dengan adanya independensi dan objektivitas yang dimiliki auditor internal, diharapkan audit yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan hasil audit akan objektif.

Menurut **Hiro Tugiman (1997;20)** Independensi itu adalah:

Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif para auditor internal.

Sementara itu **Brink and Witt (1982;20)**

“Internal auditor are independent when they can carry out their work freely and objectively. Independence permits internal audit to render the impartial and unbiased judgement essential to the proper conduct of audit Its is achieved through organizational status and objectivity”.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa independensi memungkinkan auditor internal untuk dapat melakukan pekerjaannya secara bebas dan objektif juga memungkinkan auditor internal membuat pertimbangan penting secara netral dan tidak menyimpang.

Independensi menyangkut dua aspek menurut **Hiro Tugiman (1997;20)** yaitu:

#### 1. Status Organisasi

Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. Auditor internal harus mempunyai dukungan dari manajemen senior dan dewan direksi, sehingga mereka akan mendapatkan kerja sama dari pihak yang akan diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain.

#### 2. Objektivitas

Para pemeriksa internal atau auditor internal haruslah melakukan pemeriksaan secara objektif.

- a. Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh pemeriksa internal (internal auditor) dalam melaksanakan pemeriksaan.

- b. Sikap objektif akan memungkinkan para auditor internal melaksanakan pemeriksaan dengan suatu cara, sehingga mereka akan sungguh-sungguh yakin atas hasil pekerjaannya dan tidak akan membuat penilaian yang kualitasnya merupakan hasil kesepakatan atau diragukan.
- c. Sikap objektif auditor internal tidaklah terpengaruh atau berkurang bila pemeriksa menganjurkan suatu standar pengawasan bagi sistem-sistem atau meninjau (review) prosedur sebelum hal-hal tersebut ditetapkan.

### **2.3 Efektivitas**

Pengertian efektivitas menurut **Komaruddin (1994;269)** adalah:

”Suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Tercapainya tujuan manajemen (artinya manajemen yang efektif) tidak selamanya disertai dengan efisiensi yang maksimum. Dengan perkataan lain manajemen yang efektif tidak selalu perlu disertai manajemen yang efisien.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran suatu organisasi dalam pencapaian tujuan.

### **2.4 Good Corporate Governance**

#### **2.4.1 Pengertian Good Corporate Governance**

Ada banyak pengertian untuk GCG. Menurut jurnal World Bank

**(<http://www.worldbank.com>)** pengertian GCG adalah sebagai berikut:

“The blend of law, regulation and appropriate voluntary private sector practice, which enable a corporation to attract finance and human capital, perform

efficiently and thereby perpetual it self by generating long term economic value Jar its share holders and society as a whole”.

GCG itu sebagai kumpulan hukum, peraturan dan dibuat sengaja secara tepat oleh sector swasta, memungkinkan suatu korporasi untuk menarik keuangan dan modal manusia, melaksanakan secara efisien dan terus menerus dengan nilai ekonomi yang meningkat dalam jangka panjang untuk masyarakat dan pemegang sahamnya.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan Corporate Governance sebagai :

“...seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).”

Sedangkan berdasarkan **KEPMEN-117/2002 pasal 1** disebutkan bahwa pengertian Good Corporate Governance adalah :

“Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan perundangan dan nilai-nilai etika.”

Dari sekian banyaknya pengertian Good Corporate Governance I Nyoman Tjager menyimpulkan GCG dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mengelola perusahaan agar lebih efisien dan profitable namun tetap memperhatikan perlindungan terhadap pemegang saham.

Corporate Governance mencakup beberapa hal seperti perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, perlakuan yang adil, peranan stakeholder dalam GCG, keterbukaan dan transparansi serta peranan Board of Directors dalam perusahaan.

Dalam konsep, GCG merupakan suatu sistem mengenai bagaimana suatu usaha dikelola dan diawasi. Oleh karena itu struktur GCG seharusnya mencakup pengertian sebagai berikut:

1. Adanya pemisahan antara hak dan pertanggungjawaban antara pelaku dalam perusahaan seperti manajemen, pemegang saham dan stakeholder. Di samping itu harus terdapat pemisahan yang jelas pula antara manajemen dan pemilik perusahaan.
2. Adanya landasan dan norma yang jelas dari pemilik perusahaan (pemegang saham) untuk menyadari bahwa manajemen perusahaan harus tunduk pada prosedur dan ketentuan yang mengikat khususnya yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan perusahaan.

Istilah Corporate Governance berbeda dengan Good Management apabila Good Management diartikan sebagai pengelola yang baik, maka GCG diartikan sebagai cara pengelolaan yang melibatkan hubungan dengan berbagai pihak untuk menentukan arah dan kinerja perusahaan (Media Akuntansi, David Melvill, 2000).

## 2.4.2 Sejarah Good Corporate Governance

Konsep Corporate Governance yang komprehensif mulai berkembang sejak kejadian “The New York Stock Exchange Crash” pada 19 oktober 1987, dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat dalam bursa efek New York mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Di kala itu, untuk mengantisipasi permasalahan internal perusahaan, banyak para eksekutif yang melakukan rekayasa keuangan yang intinya bagaimana menyembunyikan kerugian perusahaan atau memperindah penampilan kinerja manajemen dan laporan keuangan, yang dilakukan tidak hanya window dressing tetapi juga financial engineering.

Lazimnya pada situasi bisnis kondusif penyimpangan kelakuan baik oleh oknum maupun secara kolektif dalam perusahaan sangat kabur, namun pada saat kesulitan, mulailah terbuka segala macam sumber-sumber penyimpangan (irregularities) dan penyebab kerugian dan kejatuhan perusahaan mulai dari kelakuan profiteering, commercial crime, hingga economic crime.

Dalam kesadaran tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa, oleh segenap negarawan, cendekiawan dan usahawan; dimulailah gerakan untuk meningkatkan praktik-praktik yang baik dalam mengelola perusahaan. Gerakan ini dimulai oleh tokoh-tokoh inggris yang saat itu dipimpin oleh Sir Adrian Cadbury, yang saat itu sebagai Direktur Bank Of England dan mantan CEO grup Cadbury. Sejak terbitnya Cadbury Code on Corporate Governance pada tahun 1992, semakin banyak institusi

yang telah melakukan penyempurnaan pada prinsip-prinsip dan petunjuk teknik praktik Good Corporate Governance, antara lain ICGN (International Corporate Governance Network) yang mendorong OECD mengeluarkan OECD Principles on Corporate Governance. Di Indonesia juga telah berdiri organisasi-organisasi yang memfokuskan diri pada masalah pelaksanaan Good Corporate Governance di Indonesia, yaitu Forum for Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional kebijakan Corporate Governance Indonesia, dan terakhir Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Di samping badan-badan tersebut, juga terdapat organisasi yang peduli masalah GCG di Indonesia, seperti Ikatan Akuntansi Indonesia, Bursa Efek Jakarta, dan Bappepam, sebagai institusi yang berhubungan langsung dengan implementasi GCG.

### **2.4.3 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance**

Penerapan Good Corporate Governance dimaksudkan untuk menghindari sistem politik dan hak-hak, dan lebih mengacu kepada manajemen ekonomi suatu Negara, sumber-sumber sosial untuk pembangunan, dan kebutuhan untuk kerangka kerja aturan dan institusi yang dapat diperhitungkan dengan secara jelas. Adapun prinsip Good Corporate Governance berdasarkan **KEPMEN-117/2002** adalah :

#### **1. Transparansi (transparency)**

Transparansi, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan

relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini sangat penting bagi pemegang saham dan merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para pemegang kepentingan (stakeholders).

#### A. Hal-hal yang harus diungkapkan

##### 1. Financial and operating result

Laporan keuangan yang sudah diaudit adalah sumber informasi bagi memonitor kinerja keuangan dan meletakkan dasar bagi penilaian asset sekuritas. Diskusi manajemen dan analisis operasi kadang juga menyertai laporan keuangan. Pengungkapan hal-hal di atas akan bermanfaat bagi investor.

##### 2. Tujuan perusahaan

Tujuan perusahaan harus disosialisasikan kepada lingkungan bisnis dan masyarakat umum. Informasi ini mungkin penting bagi investor dan pengguna lainnya untuk mengevaluasi hubungan perusahaan dengan komunitas tempat mereka beroperasi dan langkah-langkah yang akan diambil perusahaan untuk mencapai tujuannya.

##### 3. Kepemilikan saham

Salah satu hak investor adalah mendapatkan informasi hingga struktur kepemilikan perusahaan hingga hak-hak pemilik perusahaan. Pengungkapan

yang diperlukan adalah data pemegang saham mayoritas, hak-hak voting khusus, persetujuan pemegang saham dan lain-lain.

#### 4. Anggota dewan eksekutif dan gaji mereka

Pasar membutuhkan informasi ini untuk mengevaluasi kinerja dan kualifikasi anggota dewan serta mengukur berapa besar potensi konflik kepentingan akan mempengaruhi keputusan mereka. Pengungkapan gaji dewan eksekutif adalah untuk mengukur biaya dan manfaat dari rencana gaji tersebut. Serta kontribusi apa yang di dapat dari tunjangan seperti stock option bagi kinerja dewan.

#### 5. Faktor-faktor risiko yang dapat diduga materiil

Informasi mengenai ini misalnya risiko yang timbul dari wilayah geografis, ketergantungan atas komoditas yang tertentu risiko tingkat suku bunga, risiko transaksi derivative dan transaksi off-balance sheet dan risiko kenisakan lingkungan hidup.

#### 6. Isu-isu materiil yang berkenaan dengan kepegawaian dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Isu-isu materiil adalah isu-isu yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal-hal yang diungkapkan misalnya hubungan antara karyawan manajemen dan hubungan dengan stakeholders.

## 7. Struktur pengendalian kebijakan

Perusahaan harus mengungkapkan bagaimana mereka mewujudkan GCG, untuk mengukur keberhasilan pencapaian GCG.

- B. Setiap informasi yang diungkapkan haruslah disiapkan, diaudit terlebih dahulu agar mempunyai standar kualitas yang tinggi.
- C. Audit tahunan harus dilaksanakan auditor independent untuk memberikan informasi yang independent bagi pihak eksternal.
- D. Jalur penyebaran informasi, harus mencerminkan keadilan, ketepatan waktu dan efisiensi biaya agar informasi relevan.

## 2. Akuntabilitas (accountability)

Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dengan kata lain prinsip ini menegaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Pengalaman selama ini banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama yang berbentuk tertutup ketidakjelasan fungsi dalam pengelolaan perusahaan, misalnya siapa yang diawasi dan siapa yang mengawasi. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penyiapan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat dan tepat.

Kerangka kerja GCG memastikan sistem pengendalian strategis dan monitoring berjalan dengan baik serta memastikan akuntabilitas dewan eksekutif pada

perusahaan, pemegang saham dan stakeholder. Dewan bertanggung jawab untuk memantau kinerja dan pencapaian target bagi pemegang saham, sekaligus mencegah berlarutnya konflik kepentingan serta menjaga kompetensi yang adil dalam perusahaan. agar akuntabilitas terwujudnya dengan baik dan efektif, dewan harus menjaga independensi manajemen.. Tanggung jawab dewan yang lain adalah memastikan ditaatinya hukum, pajak, etika, dan lain-lain. Beberapa karakteristik akuntabilitas adalah :

- a) Anggota dewan harus bertindak didasari informasi yang lengkap.
- b) Bila keputusan dewan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda di antara pemegang saham, dewan harus memuaskan keluhan pemegang saham.
- c) Dewan harus menjamin ketaatan atas hokum yang ditetapkan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham.
- d) Dewan harus memenuhi beberapa fungsi:
  - Melakukan review atas strategi perusahaan, pelaksanaan rencana mana, kebijakan resiko, abggaran tahunan dan rencana bisnis, pemantauan kinerja perusahaan dan mengawasi harta utama, pembelanjaan dan akuisisi
  - Menyeleksi, memberikan penghargaan, memantau hingga bila dibutuhkan mengawasi succession planning
  - Melakukan review atas gaji eksekutif dan memastikan proses pencalonan anggota dewan terbuka

- Memantau dan mengelola konflik kepentingan manajemen, dewan dan pemegang saham termasuk penyalahgunaan hubungan transaksi dengan berbagai pihak
- Memastikan integritas sistem pelaporan akuntansi dan financial perusahaan melalui audit yang independent dan sistem pengendalian yang tepat berada ditempatnya. Di sisi lain sistem pemantauan risiko, pengendalian keuangan harus taat pada hukum
- Dewan harus mampu menggunakan pertumbuhan yang objektif.

### **3. Keadilan (Fairness)**

Keadilan adalah prinsip yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang berkepentingan misalnya pemegang saham.

A. Hak-hak pemegang saham utama adalah:

- 1.Keamanan dalam metode pendaftaran kepemilikan.
- 2.Menerima informasi tepat waktu.
- 3.Partisipasi data voting dalam RUPS.
- 4.Memilih anggota dewan.
- 5.Mendapatkan deviden.

B. Hak berpartisipasi menentukan arah perusahaan

Hak mendapatkan informasi yang akurat dan seimbang keadilan. Keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat dilaksanakan dengan:

1. Kesetaraan dalam pemuas keluhan
2. Kesamaan dalam memperoleh informasi tentang perusahaan
3. Pelarangan insider trading serta korupsi kolusi dan nepotisme

#### **4. Pertanggungjawaban (responsibilities)**

Pertanggungjawaban, adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat atau stakeholder dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis, serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat. Oleh karena itu setiap perusahaan harus menyadari bahwa beroperasinya perusahaan tidak dapat dengan sendiri tanpa adanya dukungan dan kerjasama aktif dengan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

#### **5. Kemandirian (independency)**

Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan perusahaan harus secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak akan ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan dapat menghasilkan keputusan yang obyektif.

Selama ini dalam praktik di Indonesia, prinsip ini kurang didukung oleh regulasi yang ada, sehingga pengaruh pemegang saham terhadap pengelola atau agen perusahaan sangat besar, terkadang Direksi tidak memiliki kekuatan untuk melawan pengaruh internal dan eksternal dalam membuat keputusan. Untuk itu, dalam meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan seharusnya mengembangkan aturan atau pedoman yang jelas dan tegas tentang bagaimana eksistensi organ-organ perusahaan terutama Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham menjalankan roda perusahaan.

#### **2.4.4 Aspek-aspek Good Corporate Governance**

I Putu Gede Ary Suta, seperti yang dikutip [www.jsx.com](http://www.jsx.com). Menyatakan bahwa penerapan corporate governance membutuhkan perhatian dari jajaran atas perusahaan dan harus menjadi bagian dari rencana usaha dan rencana pengendalian.

Ada beberapa aspek penting corporate governance:

1. Manajemen harus *accountable* di hadapan pemegang saham. Direksi dan komisaris bertanggungjawab terhadap pemodal atas hasil operasi dan hasil keuangan perusahaan. Undang-undang perseroan harus mengakomodir hal ini.
2. Manajemen harus bebas dari benturan kepentingan dan harus mampu melaksanakan aktivitasnya secara *independent* dalam mencapai sasaran perusahaan.

3. Manajemen harus mengerti dan berkeinginan untuk menjalankan prinsip full disclosure. Pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang cepat mengenai masalah keuangan dan operasi perusahaan yang relevan. Penerapan prinsip disclosure juga mencakup informasi mengenai kebijakan manajemen dan tidak adanya benturan kepentingan manajemen.
4. Seorang professional yang independent harus melakukan audit terhadap keuangan perusahaan dan sebuah komite pengawasan tingkat tinggi harus mengawasi sistem akuntansi dan pengendalian perusahaan.

Sedangkan menurut **Emirzon (2007:95)** terdapat beberapa aspek penting dari GCG yang perlu dipahami beragam kalangan bisnis, yaitu :

1. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ tersebut
2. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan stakeholder. Diantaranya, tanggung jawab pengelola perusahaan, manajemen, pengawasan, serta penanggungjawaban kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya.
3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan

serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perubahan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhan.

4. Adanya perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bias menguntungkan orang dalam. (insider information for insider trading)

#### **2.4.5 Tujuan Good Corporate Governance**

Berdasarkan berbagai definisi atau pengertian GCG yang disampaikan dapat diketahui ada lima macam tujuan utama Good Corporate Governance, yaitu :

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Director dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Director dengan manajemen senior perusahaan.

Sedangkan berdasarkan surat **Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002** menjelaskan bahwa penerapan Good Corporate Governance pada BUMN bertujuan untuk :

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien serta mememberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;
3. Mendorong agar organ dalam pembuatan keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
5. Mensukseskan program privatisasi.

#### **2.4.6 Manfaat Good Corporate Governance**

Corporate Governance sebagai suatu sistem bagaimana suatu perusahaan dikelola dan diawasi, pelaksanaan Corporate Governance yang baik membawa banyak manfaat dari penerapannya. Berikut ini beberapa pendapat dari berbagai sumber :

1. Menurut David Melvill, presiden Chartered Institute of Management Accountant, ada beberapa keuntungan dari penerapan GCG, antara lain :  
mengurangi resiko, membantu menjamin kepatuhan dengan peraturan yang ada, meningkatkan kepemimpinan di dalam perusahaan, memacu

kinerja, membantu perusahaan dalam upaya go public, meningkatkan kepercayaan para pemegang saham, dan akuntabilitas sosial akan terungkap jelas.

2. Menurut Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal yang dikutip oleh **Emirzon (2007:66)** berpendapat bahwa manfaat penerapan GCG, sebagai berikut:

- a. Perbaikan dalam komunikasi; dalam posisi yang sejajar antara pemegang saham mayoritas, minoritas, dan asing serta stakeholder yang berkepentingan lain, akan tumbuh komunikasi yang baik dan saling membutuhkan..
- b. Minimalisasi potensi benturan.
- c. Fokus Perbaikan dan komunikasi.
- d. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi.
- e. Promosi citra korporat.
- f. Peningkatan kepuasan pelanggan.
- g. Perolehan kepercayaan investor.

3. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia, dalam [www.fcgi.co.id](http://www.fcgi.co.id) mengungkapkan kegunaan GCG, sebagai berikut :

- a. Biaya modal yang lebih rendah.
- b. Lebih mudah memperoleh modal.
- c. Memperbaiki kinerja usaha.
- d. Mempengaruhi harga saham.
- e. Memperbaiki kinerja ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan beberapa manfaat Good Corporate Governance, antara lain :

1. Entitas bisnis akan lebih efisien.
2. Meningkatkan kepercayaan publik.
3. Menjaga going concern perusahaan.
4. Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan produktivitas.
6. Mengurangi distorsi (management risk).
7. Meningkatkan harga saham.
8. Mengurangi cost of capital.
9. Meningkatkan corporate image.

## **2.5 Peranan Audit Internal terhadap Efektivitas Pelaksanaan Good Corporate Governance**

Presiden CIMA (Chartered Institute of Management Accountant) David Melvill (Media Akuntansi, 2000) mengatakan guna menjamin efektivitas GCG diperlukan sebuah cara. Hal itu harus dilakukan secara kolektif oleh pekerja-pekerja di dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda. Upaya melakukan GCG dapat dilakukan jika masing-masing pihak dalam perusahaan menyadari perannya untuk mewujudkan GCG.

Audit internal dapat berperan dalam:

1. Membantu dewan dalam menilai risiko utama dan memberi nasehat pada pihak manajemen
2. Mengevaluasi sistem pengendalian internal dan bertanggungjawab kepada komite audit
3. Menelaah peraturan GCG minimal setahun sekali

Keterkaitan antara audit internal dengan GCG bisa dilihat dan definisi, tujuan, ruang lingkup, wewenang tugas dan tanggungjawab audit internal dihubungkan dengan prinsip-prinsip GCG. Dilihat dan definisinya, audit internal suatu aktivitas independent yang memberikan jaminan keyakinan serta meningkatkan kegiatan operasi perusahaan. Audit internal membantu organisasi dalam mencapai tujuan, mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian serta proses peraturan dan pengelolaan organisasi. Dan definisi ini juga tersirat tujuan audit internal yaitu membantu seluruh anggota manajemen agar dapat melaksanakan tanggung jawab secara efektif, dengan jalan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, saran dan keterangan dari operasi perusahaan yang diperiksanya. Ada empat aktivitas utama audit internal yaitu compliance, operational, verification, dan evaluation. Sudah tampak suatu hubungan antara audit internal dengan prinsip-prinsip GCG. Semua aktivitas, tujuan dan ruang lingkup audit internal dapat mendukung pelaksanaan GCG beserta prinsip-prinsipnya.

Audit internal dapat memberikan sebuah jawaban yang diinginkan oleh pihak stakeholder, pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

**Gambar 2.1**

**Peranan Audit Internal terhadap Efektivitas Pelaksanaan Good Corporate Governance**

